

TESIS

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SATKER SEBELUM BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN SATKER SETELAH MENJADI BLU LAYANAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

***A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE
OF WORKING UNITS BEFORE PUBLIC SERVICE AGENCY (BLU) AND
WORKING UNITS AFTER BECOMING EDUCATIONAL SERVICE BLUS
AT THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

ROCHMAD MUNANDAR



**MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SATKER
SEBELUM BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN SATKER
SETELAH MENJADI BLU LAYANAN PENDIDIKAN PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

***A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE
OF WORKING UNITS BEFORE PUBLIC SERVICE AGENCY (BLU) AND
WORKING UNITS AFTER BECOMING EDUCATIONAL SERVICE BLUS
AT THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Manajemen

Disusun dan diajukan oleh

ROCHMAD MUNANDAR

A012221026



**MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
SATKER SEBELUM BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DAN SATKER SETELAH MENJADI BLU LAYANAN PENDIDIKAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

ROCHMAD MUNANDAR
NIM A012221026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si
NIP 196011131993031001

Dr. Fauzi R. Rahim, SE., M.Si., CFP., AEPP
NIP 196503141994031001

Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.Si.
NIP 196011131993031002



Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir., S.E., M.Si., CIPM.
NIP 196402051988101001



PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rochmad Munandar

NIM : A012221026

Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis berjudul

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SATKER SEBELUM BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN SATKER SETELAH MENJADI BLU LAYANAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rochmad Munandar



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Satker Sebelum Badan Layanan Umum (BLU) dan Satker Setelah Menjadi Blu Layanan Pendidikan Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**”. Tesis ini merupakan tugas akhir dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, data dan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP. selaku Dekan FEB Universitas Hasanuddin (periode 2017-sekarang) beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE.,M.Si., selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis
4. Bapak Prof.Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fauzi R. Rahim, SE., M.Si., CFP., AEPP selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini
5. Bapak Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM dan Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si., CRA., CRP., CWM serta Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyelesaian tesis ini

ibu dan bapak tercinta ayahanda Idah Supu Alimin (Almarhum) dan ibunda
 Hartinah, mertua, saudara dan istriku Dr. Rita Irma, SST., MPH., yang
 telah kesabaran dan keikhlasan memberikan dukungan, doa dan motivasi
 dan perhatian selama perkuliahan



7. Bapak/Ibu Staf dan Pegawai di lingkup Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu seluruh proses pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Magister Manajemen
8. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan izin melaksanakan Penelitian dilingkup Dirjen Nakes serta memberikan kesempatan dan Pembiayaan Tugas Belajar di Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin
9. Bapak Teguh Fathurrahman, SKM, MPPM selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kendari yang telah memberikan saya izin melanjutkan Pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin
10. Teman-teman kantor di Politeknik Kesehatan Kendari yang memberikan saya dukungan dan motifasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu
11. Kawan-kawan seperjuangan selama kuliah Pak Heru, Nahda, Bu Fiya, Ning, Fifi dan Aliftha di kelas Keuangan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dengan bantuan dan doa yang diberikan semoga dapat bernilai pahala disisi Allah SWT. Selama penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan serta keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan, atau kesalahan dalam karya tulis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Makassar, Mei 2024

Rochmad Munandar



ABSTRAK

ROCHMAD MUNANDAR. *Analisis Pertandingan Kinerja Keuangan Satker Sebelum Badan Layanan Umum (BLU) dan Satker Setelah Menjadi BLU Layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (dibimbing oleh Cipi Pahlevi dan Fauzi R. Rahim).

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kinerja keuangan satker yang belum menjadi Badan Layanan Umum dan satker yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Metode pengambilan sampel adalah sampel jenuh yang terdiri atas dua puluh satker belum menjadi Badan Layanan Umum dan delapan belas satker sudah menjadi Badan Layanan Umum. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan *Audited* tahun 2022 yang dikumpulkan dari seluruh satker yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, laporan keuangan tiap satuan kerja diolah untuk menghitung variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-11/PB/2021 yaitu CR (*Current Ratio*), ROK (Rasio Optimalisasi Kas), POBO (Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional), ROA (Rasio Imbalan atas Aset), ROE (Rasio Imbalan atas Ekuitas), dan RTK (Rasio Tingkat Kemandirian). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji *Independent Sample T-Test* dan uji *Mann-Whitney U test*. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal, digunakan uji *Independent Sample T-Test*, namun jika data tidak berdistribusi normal digunakan uji *Mann-Whitney U test*. Data dianalisis dengan bantuan program SPSS ver 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian terdapat perbedaan yang signifikan yaitu variabel CR (*Current Ratio*), ROK (Rasio Optimalisasi Kas), POBO (Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional), ROA (Rasio Imbalan atas Aset), ROE (Rasio Imbalan atas Ekuitas), dan RTK (Rasio Tingkat Kemandirian) antara satker yang belum menjadi Badan Layanan Umum dan satker yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan, badan layanan umum, kementerian kesehatan



ABSTRACT

ROCHMAD MUNANDAR. *A Comparative Analysis Between Financial Performance of Working Units Before Public Service Agency (BLU) and Working Units After Becoming Educational Service BLUs at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia* (supervised by Cepi Pahlevi and Fauzi R Rahim)

This research aims to determine the comparison between the financial performance of work units that have not yet become Public Service Bodies and work units that have become Public Education Service Bodies at the Ministry of Health of the Republic Indonesia. The sampling method used was a saturated sample consisting of 20 work units that had not yet become Public Service Bodies and 18 work units that had become Public Service Bodies. The data used were secondary data, i.e. the 2022 Audited financial report collected from all work units that were the research sample. Then the financial reports for each work unit were processed to calculate the variables used to measure financial performance which had been stipulated in the Director General of Treasury Regulation No. Per-11/PB/2021, i.e. CR (Current Ratio), ROK (Cash Optimization Ratio), POBO (Ratio of Operating Income to Operating Expenses), ROA (Return on Assets Ratio), ROE (Return on Equity Ratio) and RTK (Independence Level Ratio). The data analysis methods used in this research included normality test, Independent Sample T-Test, and Mann-Whitney U test. The normality test was carried out to see whether the data were normally distributed or not. If the data were normally distributed, the Independent Sample T-Test was used, but if the data were not normally distributed, the Mann-Whitney U test was used. The data were explained with the help of the SPSS ver 25.0 program. The results show that there are significant differences of all research, i.e. variables CR (Current Ratio), ROK (Cash Optimization Ratio), POBO (Ratio of Operating Income to Operating Expenses), ROA (Return on Assets Ratio), ROE (Return on Equity Ratio), and RTK (Independence Level Ratio) between work units that have not yet become Public Service Bodies and work units that have become Public Education Service Bodies at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

Keywords: financial performance, financial ratios, public service agency, Ministry of Health



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Agency Theory	11
2.1.2 Pengertian Badan Layanan Umum	12
2.1.3 Laporan Keuangan	15
2.1.4 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum	17
2.1.5 Kinerja Keuangan.....	19
2.1.6 Rasio Keuangan.....	20
2.2 Tinjauan Empiris.....	24
BAB III.....	28
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	28
3.1 Kerangka Konseptual	28
Hipotesis	29
.....	32
REVISI PENELITIAN.....	32
Rancangan Penelitian.....	32



4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	32
4.3.1 Populasi	32
4.3.2 Sampel	33
4.4 Jenis dan Sumber Data	34
4.4.1 Jenis data.....	34
4.4.2 Sumber data	34
4.5 Metode Pengumpulan Data	34
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
4.6.1 Variabel Penelitian	35
4.6.2 Definisi Operasional.....	37
4.7 Teknik Analisis Data	38
4.7.1 Statistik Deskriptif.....	38
4.7.2 Uji Normalitas	39
4.7.3 Uji Beda.....	39
BAB V	41
Hasil dan Pembahasan	41
5.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
5.2 Analisis data	43
5.2.1 Statistik Deskriptif	43
5.2.2 Uji Normalitas	48
5.2.3 Hasil Uji Hipotesis	51
5.3 Pembahasan	53
BAB VI	65
Kesimpulan dan Saran	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Keterbatasan Penelitian	66
6.3 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pendapatan Satker BLU tahun 2022	4
1.2 Pendapatan Satker Non BLU tahun 2022	5
2.1 Perbedaan Karakteristik Satker Non BLU dan BLU	12
2.2 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Daftar Satuan Kerja (Satker) BLU dan Non BLU	33
4.2 Definisi Operasional Variabel	37
5.1 Data Politeknik Kesehatan Kemenkes se Indonesia Tahun 2022	42
5.2 Hasil Statistik Deskriptif satker Sebelum menjadi BLU	44
5.3 Hasil Statistik Deskriptif satker Setelah menjadi BLU	46
5.4 Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Shapiro Wilk untuk satker belum dan Setelah menjadi BLU.....	49
5.5 Hasil Uji Mann-Whitney U test dan Uji Independent sample T-Test Variabel Rasio Untuk satker belum dan Setelah menjadi BLU	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Perkembangan Jumlah BLU dari Tahun 2005-2022	3
3.1	Kerangka Konseptual	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia karena Indonesia sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Hal yang paling sering didengar setelah masa reformasi adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik.

Reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dimulai dengan terjadinya perubahan dari penganggaran yang bersifat tradisional menjadi penganggaran yang berbasis kinerja. Sehingga arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Penganggaran yang berbasis output mendorong bagi satuan kerja atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam memberikan pelayanan satuan kerja sering kali terkendala dengan prosedur birokrasi yang panjang dan rendahnya fleksibilitas pengelolaan keuangan. Sehingga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat sering terkendala. Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas instansi yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk menerapkan PPK-BLU.

Didalam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) pasal 29 menjelaskan bahwa "Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara". Kemudian Pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004) Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa: "Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas."



Kemudian pada pasal 69 ayat 7 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan Pemerintah, sehingga diterbitkanlah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23, 2005) tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan PP no 74 tahun 2012. Dari Peraturan Pemerintah tersebut maka Menteri Keuangan yang diberikan amanah menerbitkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, 2020) yang telah dirubah dengan PMK No 202 /PMK.05/2022 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Untuk mewujudkan pengelolaan yang fleksibel maka dibentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jika ditinjau dari aspek manajemen keuangan, BLU menerapkan manajemen bisnis dimana kegiatannya operasional BLU diarahkan pada praktek bisnis yang sehat. Tentu operasional manajemen keuangan BLU ini berbeda dengan satuan kerja yang murni menerapkan pola APBN/APBD. Walaupun manajemen keuangan BLU menerapkan manajemen bisnis yang sehat, tetapi BLU tidak semata-mata mengejar keuntungan (*non profit oriented*), sedangkan BUMN/BUMD merupakan badan usaha yang mengejar keuntungan.

Pola pengelolaan yang berbasis praktek bisnis yang sehat harus diterapkan pada unit bisnis dalam operasional masing-masing BLU, dengan demikian diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pada satuan kerja pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU. Instansi BLU dapat menggunakan langsung pendapatan untuk operasionalnya tanpa menyetor ke kas negara/kas daerah dan surplus BLU yang diperoleh dapat digunakan untuk menambah penghasilan BLU berbeda dengan instansi atau satker Non BLU. Tetapi di sisi lain instansi yang menerapkan PPK-BLU merupakan satuan kerja pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan kementerian / lembaga /

ah daerah.

dan layanan umum di Indonesia dimulai tahun 2005 mulai dari 13 satker berkembang hingga tahun 2022 menjadi 265 satker.





Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah BLU dari Tahun 2005 – 2022 (Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 2023)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Badan Layanan Umum rumpun pendidikan merupakan yang terbanyak sebesar 119 satker, rumpun kesehatan 106 satker, rumpun pengelolaan barang dan jasa sebanyak 25 satker, rumpun pengelola dana sebanyak 8 satker dan rumpun pengelola Kawasan sebanyak 7 satker.

Badan layanan umum merupakan instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada Masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penilaian pencapaian kinerja dan penerapan tatakelola yang baik pada badan layanan umum. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja bagi satker yang sudah menjadi BLU jika dibandingkan dengan dengan satker yang belum menjadi Badan Layanan Umum.

Dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum belum semua satker memiliki pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan lebih baik jika dibandingkan Ketika belum menerapkan PPK-BLU. Dalam penelitian (Maharani et al., 2013) dengan menggunakan data tahun 2006 s.d 2011 pada Universitas Sebelas Maret yang sudah menjadi BLU dari tahun 2009

analisis kinerja keuangan dengan hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan antara sebelum BLU dan setelah BLU. Hal serupa juga pada penelitian (Susandi et al., 2017) penelitian di Kabupaten Klungkung menyimpulkan tidak terjadi perbedaan kinerja



keuangan RSUD kabupaten Klungkung sebelum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLU maupun setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Hasil penelitian (Nuryanawati, 2019) menyimpulkan penerapan PPK BLU belum memberikan dampak yang signifikan pada RSUD Dr Sugiri Lamongan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qaiman et al., 2018) tentang kinerja Keuangan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar menyimpulkan Pola pengelolaan Keuangan BLU mendorong Peningkatan Kinerja Keuangan yang meliputi peningkatan nilai pendapatan dan Peningkatan Kemandirian Rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh (Efrina et al., 2019) pada BLU Universitas Jambi tahun 2018 menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Masuk dalam kategori baik dan telah melewati target yang direncanakan, tetapi penelitian tersebut tidak memasukan Rasio PNBPN terhadap biaya operasional. Hasil Penelitian (Syahromi & Cheisviyanny, 2020) juga menyimpulkan setelah menerapkan Pola pengelolaan Keuangan BLU Universitas Negeri Padang mengalami peningkatan Kinerja Keuangan.

Jika dilihat dari gambar 1 terdapat 119 satker Badan Layanan Umum rumpun pendidikan di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut yang berasal dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di Kementerian Kesehatan sebanyak 18 satker yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Pendidikan dari total 38 satker sedangkan 20 satker Pendidikan pada Kementerian Kesehatan belum menjadi satker Badan Layanan Umum. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Satker BLU Tahun 2022

No	Nama satker	Tahun menjadi BLU	Pendapatan 2022
1	Politeknik Kesehatan Medan	2009	56.407.891.416
2	Politeknik Kesehatan Bengkulu	2012	31.843.097.810
3	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	2011	42.540.872.201
4	Politeknik Kesehatan Jakarta II	2009	31.861.154.828
5	Politeknik Kesehatan Jakarta III	2009	39.632.634.619
6	Politeknik Kesehatan Semarang	2009	139.304.664.619
7	Politeknik Kesehatan Surakarta	2011	75.111.791.669
8	Politeknik Kesehatan Jogjakarta	2011	51.740.375.915
9	Politeknik Kesehatan Pontianak	2011	31.125.912.646
	Politeknik Kesehatan Makassar	2009	40.356.140.709
	Politeknik Kesehatan Malang	2011	64.528.348.214
	Politeknik Kesehatan Surabaya	2010	63.440.584.720
	Politeknik Kesehatan Bandung	2009	51.076.584.194



No	Nama satker	Tahun menjadi BLU	Pendapatan 2022
14	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur	2019	22.783.454.099
15	Politeknik Kesehatan Denpasar	2019	28.724.659.635
16	Politeknik Kesehatan Manado	2019	25.934.517.110
17	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	2019	23.468.172.613
18	Politeknik Kesehatan Kupang	2019	28.794.962.069
Jumlah			848.675.819.086
Rata-rata			47.148.656.616

Tabel 1.2.
Pendapatan Satker Non BLU Tahun 2022

No	Nama satker	Pendapatan PNBPN 2022
1	Politeknik Kesehatan Jakarta I	6.210.170.298
2	Politeknik Kesehatan Aceh	22.924.644.767
3	Politeknik Kesehatan padang	16.967.410.616
4	Politeknik Kesehatan riau	7.080.703.222
5	Politeknik Kesehatan jambi	20.349.676.097
6	Politeknik Kesehatan Palembang	20.524.287.346
7	Politeknik Kesehatan palangkaraya	6.674.393.201
8	Politeknik Kesehatan Banjarmasin	10.783.242.668
9	Politeknik Kesehatan Palu	15.549.334.360
10	Politeknik Kesehatan Kendari	10.193.985.503
11	Politeknik Kesehatan maluku	11.276.756.640
12	Politeknik Kesehatan ternate	6.755.442.388
13	Politeknik Kesehatan Jayapura	16.558.965.525
14	Politeknik Kesehatan mataram	14.141.547.712
15	Politeknik Kesehatan Gorontalo	8.584.941.464
16	Politeknik Kesehatan banten	11.215.840.920
17	Politeknik Kesehatan Pangkal pinang	3.485.963.530
18	Politeknik Kesehatan tanjung pinang	4.538.871.658
19	Politeknik Kesehatan mamuju	2.418.224.919
20	Politeknik Kesehatan sorong	6.397.193.057
Jumlah		222.631.595.891
Rata-rata		11.131.579.795

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa persetujuan satker BLU layanan pendidikan di Kementerian Kesehatan mulai tahun 2009 dan terakhir disetujui tahun 2019. Sejak tahun 2019 Hingga tahun 2022 belum ada lagi persetujuan

U Layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan yang di berikan Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pembina Badan Layanan Umum. lihat dari nilai rata-rata penerimaan satker sebelum BLU sebesar



Rp 11.131.679.795 dan satker setelah BLU memiliki pendapatan Rata-rata sebesar Rp 47.148.656.616. Jika hanya dilihat dari nilai pendapatan PNPB maka satker BLU memiliki pendapatan lebih besar dari satker belum BLU. Tetapi Kinerja Keuangan belum bisa diukur hanya dari nilai penerimaan saja tetapi masih ada indikator lainnya yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua instansi pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik pada pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefitnya (Ardilla & Putri, 2015).

Pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan sebelumnya telah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 32/PB/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan. Tetapi peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2021 Tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum., 2021). Adapun indikator kinerja keuangan berdasarkan peraturan tersebut adalah:

1. Indikator Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar (*Curent Ratio*) dan Rasio Optimalisasi Kas
2. Indikator Efisiensi dihitung dengan menggunakan Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO)

Indikator Efektifitas dihitung dengan menggunakan rasio Imbalan Atas Aset (ROA) dan Rasio Imbalan Atas Ekuitas (ROE)

Indikator Tingkat Kemandirian dihitung dengan menggunakan Total



Pendapatan Terhadap Total Belanja.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan satker yang belum menjadi Badan Layanan Umum dan satker yang sudah menjadi badan layanan umum Pendidikan pada kementerian Kesehatan dengan menggunakan indikator rasio keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Nomor Per 11/PB/2021. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Satker Sebelum Layanan Umum Dan Satker Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Pendidikan Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Rasio Lancar pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana Rasio Optimalisasi Kas pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Beban Operasioanal (POBO) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
- 1.2.4 Bagaimana Rasio Imbalan Atas Aset (ROA) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
- 1.2.5 Bagaimana Rasio Imbalan Atas Ekuitas (ROE) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
- 1.2.6 Bagaimana Rasio Tingkat Kemandirian pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

untuk menganalisis Rasio Lancar pada satker sebelum BLU dan satker



sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1.3.2 Untuk menganalisis Rasio Optimalisasi Kas pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 1.3.3 Untuk menganalisis Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Beban Operasioanal (POBO) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 1.3.4 Untuk menganalisis Rasio Imbalan Atas Aset (ROA) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 1.3.5 Untuk menganalisis Rasio Imbalan Atas Ekuitas (ROE) pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 1.3.6 Untuk menganalisis Rasio Tingkat Kemandirian pada satker sebelum BLU dan satker sesudah menjadi BLU layanan Pendidikan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain; bagi pemerintah sebagai mengambil kebijakan, stakeholder, bagi akademisi, dan bagi penelitian lanjutan.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ekonomi terkhusus bidang manajemen keuangan. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Pendidikan*

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Untuk stakeholder dan para pengambil keputusan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Layan umum.

Bagi penulis bahwa dengan dilakukan penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti. Serta menambah



wawasan tentang bagaimana cara mengelola dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang didapat dari penelitian ini di tempat bekerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan semua objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (penulis).

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti yaitu Satker yang memberikan layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan republik Indonesia baik yang belum menjadi BLU maupun satker yang sudah Menjadi BLU.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal ini terdiri atas 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teori dan konsep yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian serta tinjauan empiris yang mendukung penelitian.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana struktur kerangka konseptual dan hubungan dari variabel tersebut serta bagaimana hasil hipotesis yang muncul.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, Tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan merupakan isi pokok dari keseluruhan penelitian bab ini dan Deskripsi Objek Penelitian, menyajikan hasil pengolahan data dan analisis hasil pengolahan serta pembahasannya.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dari hasil peneltiian serta saran kepada fihak fihak yang dapat menggunakan penelitian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Agency Theory

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Elqorni, 2009).

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar Agency theory. Menurut (Bergman & Lane, 1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal agen. Hal yang sama dikemukakan oleh (Moe, 1984) yang menjelaskan konsep ekonomika sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Badan Layanan Umum merupakan organisasi sektor publik yang dioperasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang fungsi utamanya ialah menjual barang dan/atau jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum ditetapkan sebagai unit BLU, instansi tersebut dikenal dengan istilah satuan kerja (satker) yang menyelenggarakan tugas dan peran pemerintah dalam penyediaan layanan umum. Menurut ketentuannya, instansi yang sudah ditetapkan menjadi BLU dikelola bukan untuk mencari keuntungan namun atas dasar prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut teori agensifikasi, BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan dan produktivitas kinerja.



2.1.2 Pengertian Badan Layanan Umum

Dengan terbitnya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menawarkan suatu konsep baru dalam pengelolaan anggaran suatu instansi yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan publik, yang dinamakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Pengertian BLU sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU nomor 1 tahun 2004 adalah sebagai berikut: "Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Jadi satker yang sudah menjadi badan layanan umum diberikan keleluasaan atau fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya jika dibandingkan dengan satker PNBPN atau satker Belum BLU. Perbedaan Mendasar antara instansi BLU dan Instansi satuan kerja (Non BLU) adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, satker BLU memiliki orientasi not-for-profit dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, namun diperbolehkan mengelola layanan untuk mendapatkan surplus dan dapat langsung menggunakannya pada anggaran berikutnya (Tresna et al., 2023).

Beberapa perbandingan karakteristik antara Satuan Kerja dengan Badan Layanan Umum:

Tabel 2.1
Perbedaan Karakteristik Satker Non BLU dan BLU

NO	Hal	Satker Non BLU	BLU
1	Definisi	Satuan kerja adalah unit yang merupakan bagian dari suatu Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program pemerintah.	Badan Layanan Umum adalah instansi pemerintah yang menyediakan barang/atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.



NO	Hal	Satker Non BLU	BLU
2	Status kepegawaian	PNS, PPPK	PNS, PPPK Profesional
3	Manajemen	Birokratis, hirarkis, Rule and process oriented	Customer Focus, Output oriented, manajemen ala bisnis
4	Budaya	Administrative	Kinerja berdasarkan produktifitas
5	Kelembagaan	Bagian dari K/L, Struktural, eselonisasi jabatan	Agen K/L, Board Management, advisory Board (dewan Pengawas)
6	Sumber dana	APBN	APBN dan Pendapatan Jasa Layanan
7	Pengelolaan Keuangan	Tidak Boleh melampaui Pagu dan tidak memiliki saldo awal	Dapat melampaui Pagu sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan, memiliki saldo awal
8	Budgeting	Menyusun RKAKL, DIPA	Menyusun RBA, RKAKL dan DIPA

Sumber : (Direktorat PPK BLU, 2014)

Kemudian dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 2005), yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 yang telah diubah dengan PMK 202/PMK.05/2022 yang dimaksud dengan Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. (Rambe et al., 2023) Praktek bisnis yang sehat merupakan system pelayanan instansi pemerintah berdasarkan kaidah manajemen yang baik dengan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian serta

ungjawaban.

am Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 yang telah dengan PMK 202/PMK.05/2022 syarat bagi satker agar dapat diizinkan



untuk menjadi satker BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Berikut persyaratan dalam memenuhi suatu instansi sebagai BLU adalah:

1. Memenuhi persyaratan yang bersifat substantif

Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang lainnya.
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan perusahaan Kawasan, otorita, dan Kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir dan dana abadi Pendidikan.

2. Persyaratan teknis:

- a. Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU: dan
- b. Kinerja keuangan sehat

3. Persyaratan administratif:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan manfaat bagi Masyarakat
- b. Pola Tata Kelola
- c. RSB
- d. Laporan Keuangan Pokok
- e. Standar Pelayanan Minimum
- f. Laporan Audit Terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independent

Jika dilihat dari persyaratan substantif, Teknik dan administratif maka instansi yang akan diusulkan ataupun telah menjadi Badan layanan umum haruslah instansi yang menyelenggarakan layanan umum yang bersifat

komersial dan menghasilkan pendapatan serta kinerja pelayanannya layak dan ditingkatkan serta memiliki dokumen persyaratan administrative yang telah ditentukan diantaranya laporan keuangan pokok. Sehingga dari



Laporan Keuangan Instansi pemerintah baik yang belum menjadi BLU dan telah menjadi BLU dapat diukur kinerja Keuangannya.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut (Kasmir, 2019) Laporan keuangan yaitu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2015:1) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi penggunanya. laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai elemen-elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna laporan keuangan dapat memprediksi arus kas di masa yang akan datang.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015) terdapat lima jenis laporan keuangan, diantaranya :

1. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*)

Laporan ini menggambarkan suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan yang terdiri dari aktiva (*asset*), utang (*liabilities*), dan ekuitas (*equity*). Hubungan ketiganya biasanya disebut sebagai persamaan akuntansi, aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas. Aktiva terdiri atas aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tak berwujud. Utang meliputi utang lancar, dan utang jangka panjang. Sedangkan ekuitas perusahaan dapat mencakup saham preferen, saham biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan.

U laporan posisi keuangan dikenal dengan sebutan neraca.

dan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan Laba Rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan (*revenue*) dan



beban beban (*expense*) untuk suatu periode. Laporan ini menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Laporan yang menunjukkan kegiatan operasi perusahaan pada periode tertentu dan terbagi dalam dua bagian utama. Pertama, pendapatan yang meliputi pendapatan operasi (misalnya aktivitas penjualan barang dagang) dan pendapatan non-operasi (misalnya aktivitas penjualan aktiva tetap). Pendapatan operasi biasanya dinyatakan dalam istilah penjualan bersih, yakni penjualan dikurangi oleh potongan penjualan dan retur penjualan. Kedua, beban-beban yang mencakup harga pokok penjualan, beban operasi, beban bunga, dan pajak. Pada akhirnya didapatlah jumlah keuntungan atau kerugian bersih dari perhitungan-perhitungan tersebut.

3. Laporan Perubahan Modal (*Statement of Owner's Equity*)

Laporan perubahan modal secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tersebut. Modal pemilik terdiri dari dua sumber yang berbeda secara fundamental. Pertama, modal diinvestasikan dalam bisnis oleh pemilik. Kedua, laba diperoleh dan dipertahankan dalam bisnis.

4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)

Laporan ini menunjukkan arus kas perusahaan pada periode tertentu, bersumber dari kegiatan operasi (*operating*), kegiatan investasi (*investing*), dan kegiatan pendanaan (*financing*). Angka-angka yang dimasukkan ke dalam laporan arus kas berasal dari perubahan pada neraca dua tahun terakhir. Penambahan aktiva merupakan penggunaan kas dan penurunan aktiva merupakan sumber kas. Sebaliknya penambahan utang dan ekuitas merupakan sumber kas dan penurunan utang dan ekuitas merupakan penggunaan kas. Maka dari itu laporan arus kas sering disebut laporan sumber dan penggunaan kas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera ke dalam 4 laporan keuangan lainnya. Didalam laporan keuangan ini dapat berupa informasi baik

bersifat keuangan maupun non keuangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan



kontrak-kontrak utang perusahaan serta penyebab atau alasan yang berkaitan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, 2015) menjelaskan bahwa Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No 13 tahun 2015) Jenis laporan keuangan BLU terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa /kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan



dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos antara lain Pendapatan-LRA, Belanja Surplus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos yaitu Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain; dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut yaitu Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, Investasi jangka Panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang; dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut yakni Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Kegiatan nonoperasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa; dan Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.



6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos yakni Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos disajikan dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.1.5 Kinerja Keuangan

Perusahaan ataupun organisasi dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memperlihatkan hubungan antara perencanaan yang telah ditetapkan oleh dengan hasil yang telah dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut maka dapat disimpulkan apakah suatu perusahaan atau organisasi perlu untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi (Galib & Hidayat, 2018). Sedangkan (Srimindarti, 2006) Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk aktivitas perusahaan pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya – biaya masa lalu dan biaya proyeksi dengan dasar dan akuntabilitas manajemen.

menurut (Rudianto, 2013) Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya



dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu, dimana kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna mengetahui dan mengevaluasi akan tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Sedangkan (Jumingan, 2014) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik itu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

Menurut (Munawir, 2014) ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan yaitu :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

Kinerja keuangan adalah suatu prestasi yang dicapai dalam periode tertentu di bidang keuangan yang dapat diketahui melalui analisis laporan keuangan. Analisis Laporan keuangan lebih dari sekadar meninjau laporan keuangan. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja historis dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat proyeksi dan meningkatkan kinerja keuangan di masa depan. Analisis ini membantu kita melihat hubungan penting yang mungkin tidak mudah diidentifikasi. Rasio digunakan untuk membakukan informasi keuangan sehingga kita dapat melakukan perbandingan. Jika tidak, sulit untuk membandingkan laporan keuangan dua perusahaan dengan ukuran berbeda atau bahkan perusahaan yang sama pada waktu berbeda (Keown et al., 2017).



Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan perbandingan antara pos-pos tertentu dengan

pos lain yang memiliki hubungan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memberikan penilaian.

Rasio keuangan memberikan kita dua cara untuk membuat perbandingan data keuangan perusahaan yang pertama dengan menguji rasio-rasio lintas waktu untuk membandingkan kinerja perusahaan saat ini dan kinerja masa lalu; dan kedua dengan membandingkan rasio perusahaan tersebut dengan rasio perusahaan lain. Dalam membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, kita dapat memilih kelompok perusahaan sejenis, atau kita dapat menggunakan norma-norma industry (Keown et al., 2017).

Dengan menggunakan Analisa Rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, Solvabilitas, Keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu Perusahaan (*Profitability Perusahaan*). Untuk dapat mengukur hal hal tersebut diperlukan alat pembanding dan rasio dalam industry sebagai keseluruhan yang sejenis dimana Perusahaan menjadi anggotanya. Dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu Perusahaan, dari rasio industry sebagai keseluruhan ini disebut standar rasio (rasio rata-rata) (Munawir, 2014).

1. Rasio Likuiditas

Salah satu rasio keuangan adalah rasio Likuiditas. Menurut (Horne et al., 2012), likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. Rasio likuiditas terdiri dari :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut (Kasmir, 2019) rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$



b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Menurut (Kasmir, 2019) rasio cepat merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Menurut (Kasmir, 2019) rasio kas adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur sampai seberapa besar uang kas yang tersedia untuk digunakan membayar hutang. Ketersediaan uang kas bisa dilihat dari ketersediaan dana kas atau setara dengan kas, seperti tabungan di bank atau rekening giro (yang langsung ditarik). Rasio ini bisa dikatakan menunjukan kemampuan yang sebenarnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas

Menurut (Kasmir, 2019) rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri dari :

a. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Menurut (Kasmir, 2019) DAR merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan

a. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin jelek keadaan keuangan perusahaan karena semakin tinggi pula risiko keuangan



yang ditanggung oleh perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Debt To Equity Ratio (DER)

Menurut (Darsono & Ashari, 2010) DER merupakan rasio yang menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan Perusahaan, rasio profitabilitas juga menunjukkan pengaruh gabungan dari pengelolaan likuiditas, pengelolaan aset, dan hutang atas hasil operasi (Ehrhardt & Eugene F Brigham, 2011). Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Rasio profitabilitas terdiri :

a. Return On Asset (ROA)

Menurut (Kasmir, 2019) ROA adalah bagian dari analisis rasio profitabilitas. Rasio antara laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Return On equity (ROE)

Menurut (Hery, 2015) ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau nilai perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal/ekuitas.



$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM merupakan ukuran yang digunakan dalam memantau profitabilitas. NPM mengukur seberapa banyak keuntungan operasional yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Menurut (Kasmir, 2019) menyatakan bahwa NPM diperoleh dengan membandingkan laba operasional dengan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	(Malika, 2018)	Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung	Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas sebelum dan sesudah penerapannya PPK-BLUD pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi kinerja keuangan dan pelayanan RSUD Dr. Iskak Tulungagung sesudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) cenderung meningkat dan lebih baik
2	(Diskamara & Hidayat, 2023)	Gambaran Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Scoping Review	Hasil penelitian kinerja puskesmas yang menerapkan BLUD masih bervariasi dilihat dari perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif proses pembelajaran. Sedangkan dari perspektif pelanggan, kinerja puskesmas termasuk dalam kategori baik.
	Yahromi Samsudin (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah	Dari hasil perhitungan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PK BLU ini semakin membaik dari



		Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang	tahun ketahunnya meski dari sisi rasionya masih belum stabil
4	(Keumala et al., 2023)	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Pada Rsu Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah PPK-BLUD pada rasio profitabilitas, likuiditas dan aktivitas sedangkan rasio solvabilitas secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
5	(Farwitawati, 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan RSUD Bengkalis belum mampu memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh PPK-BLUD secara optimal.
6	(Tamole et al., 2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Hasil penelitian menunjukan bahwa, Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh, dan Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai Prediktor Moderator
7	(Rustam & Cahyono, 2023)	Analisis Potensi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Balai Benih Pertanian Barongan Berdasarkan Kinerja Keuangan	Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pelaksanaan BLUD di Balai Benih Pertanian Barongan memenuhi teknis persyaratan, khususnya mengenai kinerja pelayanan publik dan kinerja keuangan. Ini ditunjukkan dengan kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (kategori A) dan keuangan sehat pencapaian kinerja. Selain itu juga telah memenuhi syarat substantif dan administratif dan hal ini ditunjukkan bahwa Balai Benih



			Pertanian Barongan sebagai satuan kerja yang berada di bawah SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sesuai dengan definisi tersebut yang dimaksud dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 yaitu (a). Balai Benih Pertanian Barongan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan barang dan pelayanan publik, yang mempunyai beberapa tugas dan fungsi pengelolaan benih pertanian dan penyediaan benih bermutu unggul dan (b).
5	(Jaenudin et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri	Pengelolaan badan layanan umum yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas merupakan bagian dari hipotesis kombinasi yang menuntut perguruan tinggi untuk menerapkan praktik-praktik bisnis untuk meningkatkan layanan penyediaan jasa pendidikan. Melalui pendekatan empiris ditemukan peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan pembiayaan. Namun, terjadi distorsi dalam kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pembiayaan yang berdampak kepada kinerja sumber daya.
8	(Susanti & Dwiyanto, 2016)	Hubungan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan kinerja keuangan pada RSUP Fatmawati Jakarta	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas sangat tinggi pada nilai mentah/ideal, hal ini menunjukkan kinerja manajemen yang buruk karena banyak dana menganggur. Dilihat dari rasio solvabilitas yang berada di bawah nilai standar/ideal, sehingga dapat diartikan baik rasio solvabilitas yang rendah mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dilihat dari rasio profitabilitas berada pada rentang ukuran nilai standar/ideal, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan sangat baik karena dalam melakukan kegiatan pengelolaan berhasil menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Dilihat dari pencapaian pendapatan yang mungkin melebihi target yang direncanakan menunjukkan bahwa suatu rencana pengelolaan harus direalisasikan dengan kedua target pendapatan tersebut. dilihat dari pencapaian pembiayaan yang ditunjukkan kinerja yang baik, karena pihak manajemen



			dalam membuat perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, serta berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Dilihat dari tingkat cost recovery menunjukkan kinerja yang baik, karena dapat menutupi biaya-biaya (cost) pendapatan yang diperoleh (revenue).
9	(Sulastinin gsih et al., 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kejajar 1 Wonosobo (Periode 2016-2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja Puskesmas Kejajar 1 Tahun 2016-2020 ditinjau dari kinerja keuangan dengan menggunakan 8 pengukuran yaitu cash rasio, rasio lancar, periode penagihan, rasio perputaran aktiva tetap, return pada rasio aktiva tetap, return on equity, perputaran persediaan dan rasio PNBK terhadap biaya operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio tersebut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Jika dilihat berdasarkan kategorisasi skor, kinerja Puskesmas Kejajar 1 tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tergolong kategori sedang cenderung baik.



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan kajian kuantitatif, yaitu suatu proses yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Untuk lebih terarahnya kajian kuantitatif dalam penelitian ini perlu dibuatkan dalam suatu kerangka konseptual penelitian.

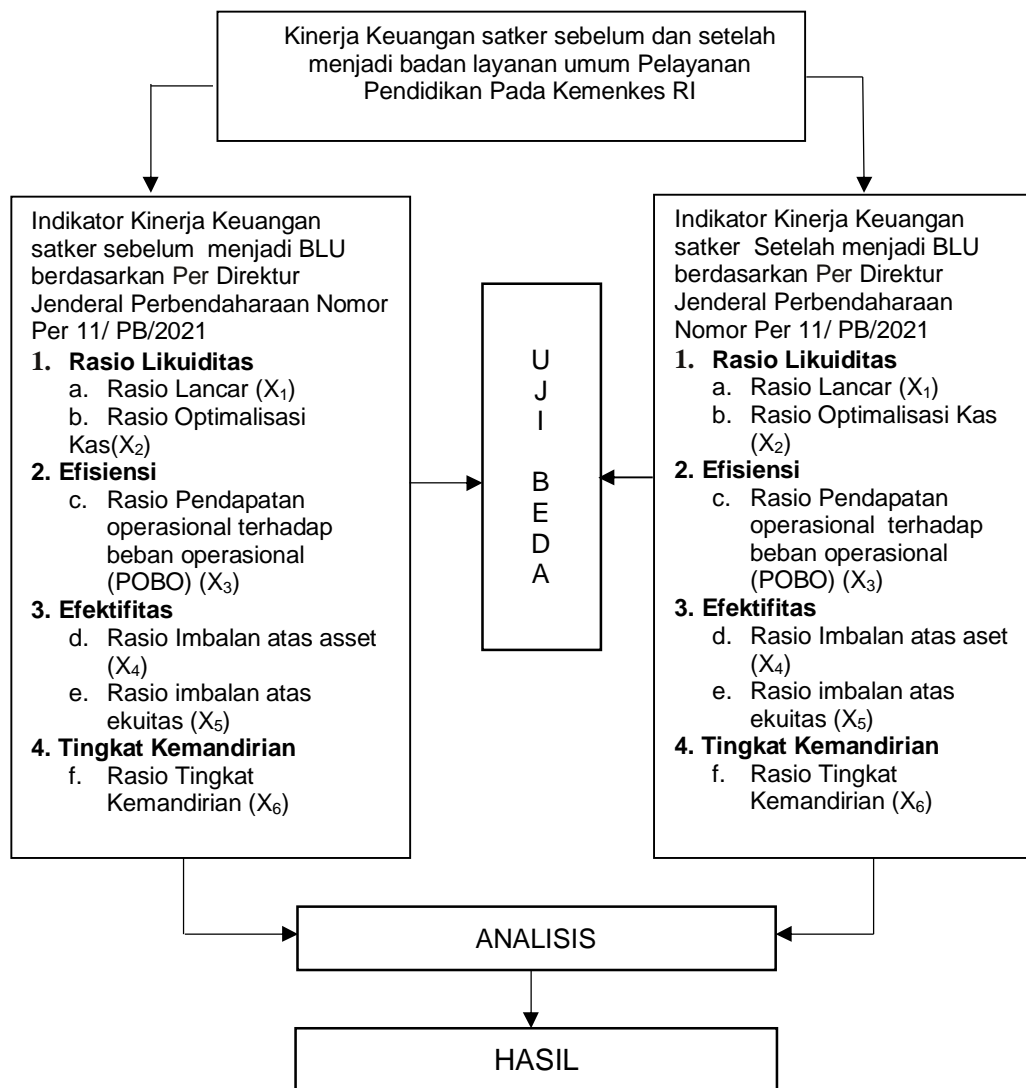
Kerangka konseptual merupakan sebuah uraian dan visualisasi mengenai kaitan atau hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan ada perbedaan kinerja Keuangan antara Satker Sebelum dan setelah menjadi BLU yang diukur dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Nomor Per 11/PB/ 2021 yang terdiri dari:

1. Indikator Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar (*Curent Ratio*) dan Rasio Optimalisasi Kas.
2. Indikator Efisiensi dihitung dengan menggunakan Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO).
3. Indikator Efektifitas dihitung dengan menggunakan rasio Imbalan Atas Aset (ROA) dan Rasio Imbalan Atas Ekuitas (ROE).
4. Indikator Tingkat Kemandirian dihitung dengan menggunakan Rasio Total Pendapatan Terhadap Total Belanja.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.





Gambar 3.1
Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang di maksud dengan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum yang empirik.

alam mengajukan Hipotesis Penelitian ini mempertimbangkan fleksibilitas memiliki satker yang telah menjadi BLU jika dibandingkan dengan satker



yang belum menjadi BLU. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2005 Badan Layanan Umum (BLU) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, fleksibilitas yang dimiliki BLU diantaranya adalah pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional, tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara, BLU memiliki kewenangan untuk melakukan optimalisasi aset dalam berbagai bentuk kerja sama dengan pihak lain atau mengelola unit usaha dan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BLU dapat memperoleh pendapatan dari investasi misalnya deposito, SPN dan Sukuk, dapat memberikan remunerasi kepada karyawan dari keuntungan yang diperolehnya sehingga kinerjanya tinggi dan Keistimewaan lainnya yang dimiliki BLU dalam mengelola Keuangan jika dibanding dengan satker Non BLU.

Dengan pertimbangan tersebut penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada Perbedaan Rasio Lancar pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Diduga ada Perbedaan Rasio Optimalisasi Kas pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Diduga ada Perbedaan Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Beban Operasioanal (POBO) pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Diduga ada Perbedaan Rasio Imbalan Atas Aset (ROA) pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Diduga ada Perbedaan Rasio Imbalan Atas Ekuitas (ROE) pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



6. Diduga ada Perbedaan Rasio Tingkat Kemandirian pada satker sebelum BLU dan satker setelah Menjadi BLU layanan Pendidikan pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

